

# **LAPORAN KEUANGAN**

## **TINGKAT UAPPA-W**

### **TAHUN 2022**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) BIMAS KATOLIK

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

ALAMAT : JL. PROF. MOH. YAMIN NO.42 PALU

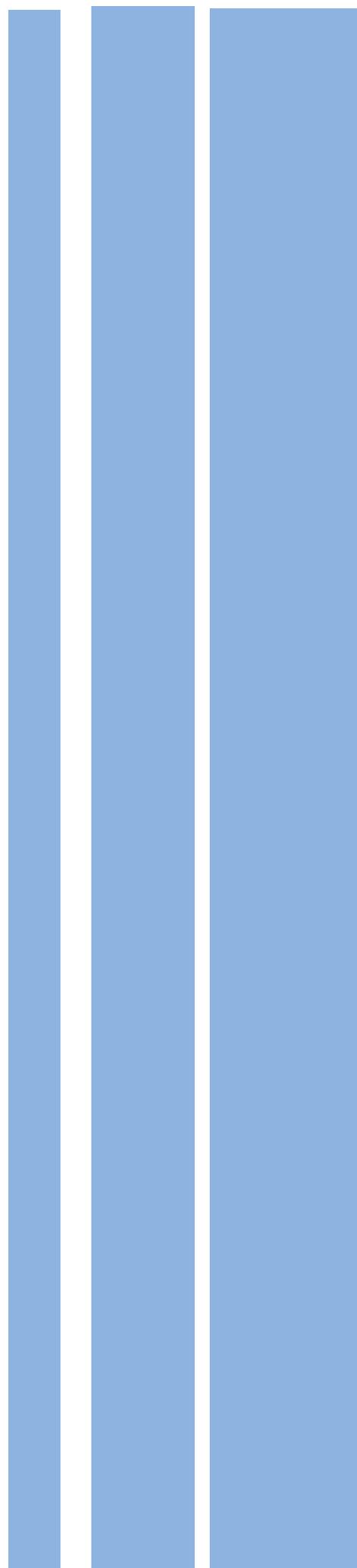
PERIODE LAPORAN : AUDITED

TAHUN ANGGARAN : 2022

**CALK UAPPAW Bimas Katolik  
Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Sulawesi Tengah**

**Untuk Periode yang Berakhir  
31 Desember Tahun Anggaran 2022**

**Jl. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu,**



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

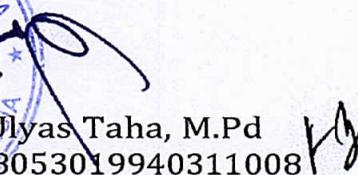
Penyusunan Laporan Keuangan Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, Mei 2023  
Kepala



Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd  
NIP. 1968053019940311008



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Pernyataan Tanggung Jawab	5
Ringkasan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 42  
Telepon. (0451) 488921 Faksimail. 488920  
E-mail kanwil sulteng @ kemenag.go.id web.http/sulteng.kemenag.go.id

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Palu, Mei 2023  
Kepala,

Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd  
NIP. 1968053019940311008

Laporan Keuangan Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara per 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp 5.586.951.313 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.784.415.000,-

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 105.437.783, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 105.437.783,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 666.000,- dan Rp 104.771.783,-

### **2. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 5.659.061.971,-sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (5.659.061.971). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,-

dan Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (5.659.061.971).

### **3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 137.955.515,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp 5.659.061.971,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 38.926.926,- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp 5.586.951.313, kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp 33.183.732,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 104.771.783,-

### **4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. Beberapa catatan atas Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat asset yg dihentikan penggunaannya karena sudah rusak berat pada satker 614909 Kantor Kementerian Agama Kota Palu senilai Rp 17. 400.000,- ( *Tujuh bela juta empat ratus ribu rupiah*).
2. Terdapat koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yaitu koreksi nilai asset non revaluasi pada tahun 2022 sebesar Rp 38.926.926,- ( *Tiga puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) dan pada tahun 2021 yaitu

koreksi atas reklasifikasi sebesar Rp 966.667,- (*Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

4. Terdapat kenaikan asset berupa peralatan dan mesin sebesar Rp 113.826.834,- (*Seratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*).

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BIMAS KATOLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH **LAPORAN REALISASI ANGGARAN** UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	THUN 2022		% thd Angg	TAHUN 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	#DIV/0!	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	#DIV/0!	-
<b>BELANJA</b>	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.714.534.000	4.518.856.548	43,00	4.688.750.990
Belanja Barang	B.4	1.069.881.000	1.068.094.765	63,00	1.102.086.618
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	70.115.574
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>5.784.415.000</b>	<b>5.586.951.313</b>	<b>47,00</b>	<b>5.860.953.182</b>

**BIMAS KATOLIK KANTOR WILAYAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NERACA**

**PER 31 Desember 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	741.491.325	627.628.491
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(647.191.399)	(489.391.776)
Jumlah Aset Tetap		94.299.926	138.236.715
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	17.400.000	8.700.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(17.400.000)	(8.700.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada pihak ketiga	C.25	-	281.200
Utang yg belum ditagihkan	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	281.200
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			281.200
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	94.299.926	137.955.515
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		94.299.926	137.955.515
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		94.299.926	138.236.715

## II. LAPORAN OPERASIONAL

**BIMAS KATOLIK KANTOR WILAYAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021**  
*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	4.518.575.348	4.689.032.190
Beban Persediaan	D.3	17.270.000	19.567.464
Beban Barang dan Jasa	D.4	814.064.579	745.131.282
Beban Pemeliharaan	D.5	54.008.755	54.711.837
Beban Perjalanan	D.6	183.751.431	272.176.035
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	10.500.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	81.863.715	59.273.709
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>5.669.533.828</b>	<b>5.850.392.517</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.669.533.828)	(5.850.392.517)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.669.533.828)	(5.850.392.517)
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(5.669.533.828)</b>	<b>(5.850.392.517)</b>

**V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****BIMAS KATOLIK KANTOR WILAYAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
EKUITAS AWAL	E.1	137.955.515	126.428.183
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.669.633.828)	(5.850.392.517)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	38.926.926	966.667
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	966.667
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	38.926.926	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		<b>38.926.926</b>	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5.586.951.313	5.860.953.182
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(43.655.589)	(11.527.332)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>94.199.926</b>	<b>137.955.515</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

##### Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Satker Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Palu. Melalui peran Satker Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Satker Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen dengan visi:

***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Satker Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi

akuntansi pemerintah berbasis akrual.

2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Satker Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Satker Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Satker Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah adalah 5 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W*

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	1800	Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	-	1	-	-	1
2	1800	Penyelenggara Katolik Kemenag Kota Palu	-	1	-	-	1
3	1800	Satker Katolik Kabupaten Parigi Moutong	-	1	-	-	1
4	1800	Satker Katolik Kabupaten Banggai	-	1	-	-	1
5	1800	Satker Katolik Kabupaten Tolitoli	-	1	-	-	1
6	1800	Satker Katolik Kabupaten Buol	-	1	-	-	1
7	1800	Satker Katolik Kabupaten Banggai Laut	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

*Basis*

*Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Palu adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) Belanja

#### *Belanja*

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

*Aset* et diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### *Aset Lancar* a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
-----------------------------------	-----------------------------

<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah belum pernah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Postur anggaran bimas Katolik Sulteng tahun 2022 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	4.571.838.000	4.714.234.000
Belanja Barang	1.128.181.000	1.070.181.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.700.019.000</b>	<b>5.784.415.000</b>

### B.1 PENDAPATAN

*Realisasi  
Pendapatan Rp  
0,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022*

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

Sampai dengan akhir periode semester 1, seluruh satker Bimas Katolik Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki pendapatan, terutama yg selama beberapa tahun terakhir yaitu pendapatan berupa penerimaan negara bukan pajak. yang berasal dari setoran kembali belanja pada tahun Anggaran yang lalu.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

**B.2. BELANJA**

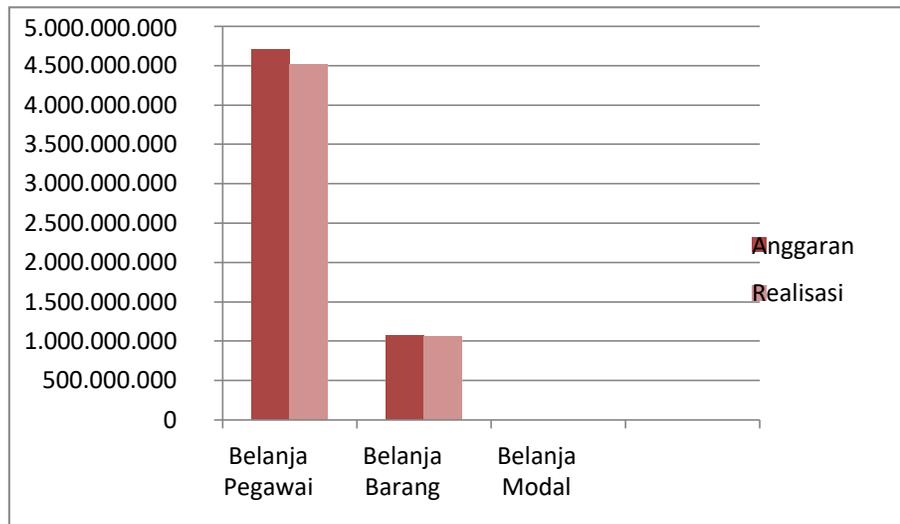
*Realisasi  
Belanja Negara  
Rp 5.586.951.313.-*

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.586.951.313 atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp 5.784.415.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 tersaji sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2022*

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.714.234.000	4.518.856.548	95,86
Belanja Barang	1.070.181.000	1.068.094.765	99,81
Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	0	0	#DIV/0!
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>5.784.415.000</b>	<b>5.586.951.313</b>	<b>96,59</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Total Belanja</b>	<b>5.784.415.000</b>	<b>5.586.951.313</b>	<b>96,59</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Bila dibandingkan dengan tingkat realisasi tahun anggaran yang lalu, maka realisasi atau serapan anggaran tahun anggaran 2022 sama yaitu 97%. Hanya ada sedikit perbedaan dimana postur anggaran tahun anggaran 2021 sedikit lebih tinggi dari tahun anggaran 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat mata anggaran belanja modal, sedangkan tahun anggaran 2021 tersedia anggaran belanja modal tersebut. Namun ada beberapa catatan terkait realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Belanja pegawai tidak terserap 100% karena ada anggaran belanja tunjangan profesi guru PNS yang tidak bisa dibayarkan sepenuhnya sampai bulan Desember 2022. Hal ini disebabkan ada salah satu guru penerima tunjangan profesi yang tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan ;*
2. *Disamping itu ada juga anggaran belanja untuk tunjangan penyuluh agama katolik Non PNS yang juga tidak terserap secara 100 %. Hal ini disebabkan karena ada penyuluh tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan alias tidak melaksanakan tugas. Disamping itu juga terdapat beberapa penyuluh yang berpindah tempat tugas. Hingga akhir tahun anggaran 2022, anggaran penyuluh yang terbanyak yang tidak terserap. Dari jumlah anggaran yg*

*tersedia sebesar Rp 720.000.000,- ( tujuh ratus dua puluh juta rupiah) hanya rp 573.000.000,- ( lima ratus tujuh puluh tiga juta yang terserap.*

*3. Sedangkan untuk belanja barang hampir semuanya terserap ( 100 %).*

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.518.856.548	4.688.750.990	(3,62)
Belanja Barang	1.068.094.765	1.102.086.618	(3,08)
Belanja Modal	-	70.115.574	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>5.586.951.313</b>	<b>5.860.953.182</b>	<b>(4,68)</b>

**B.3 Belanja Pegawai**

*Belanja  
Pegawai Rp  
4.518.856.548,-*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4,518.856.548,- dan Rp 4.688.750.990,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 walaupun belum mencapai target realisasi nasional yaitu 100 %. Penurunan realisasi ini disebabkan karena adanya belanja tunjangan profesi guru PNS yang tidak terserap secara optimal . Hal ini dikarenakan adanya 1 orang guru penerima tunjangan profesi guru yang tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan secara penuh sampai bulan Desember 2022. Yang bersangkutan hanya bisa dibayarkan sampai bulan Maret 2022. Tidak

memenuhi syarat yang dimaksudkan adalah bahwa guru tersebut tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku untuk guru penerima tunjangan sertifikasi.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.405.164.990	3.478.633.307	(2,11)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	588.000.000	854.000.000	(31,15)
Belanja Tunj. Khusus/kegiatan	526.062.159	356.118.435	47,72
Belanja Lembur	-	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.519.227.149</b>	<b>4.688.751.742</b>	<b>(3,62)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(370.601)	(752)	49.182,05
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.518.856.548</b>	<b>4.688.750.990</b>	<b>(3,62)</b>

***B.4 Belanja Barang***

*Belanja Barang Rp  
1.068.094.765,-*

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.068.094.765,- dan Rp 1.102.086.618,- Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun anggaran 2021. Penurunan realisasi sebesar 3% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Namun penurunan ini disebabkan karena pagu anggaran tahun 2021 yang lebih besar dari pagu belanja barang tahun 2022. Hal ini sebabkan karena beberapa faktor antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Pagu belanja barang tahun anggaran 2021 lebih tinggi dari pagu belanja barang tahun 2022. Ada beberapa anggaran yg tidak tersedia lagi pada tahun 2022 antara lain adalah : Honor output kegiatan, belanja barang untuk diserahkan kepda masyarakat/pemda atau belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan masyarakat untuk*

akun 526115.

2. Disamping itu anggaran belanja perjalanan dalam negeri berupa perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2021.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021*

Belanja barang Persediaan	16.270.000	19.567.464	
Belanja Jasa	47.351.370	41.976.600	12,80
Belanja Pemeliharaan	54.008.755	54.711.837	(1,29)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	183.751.431	279.660.035	(34,29)
Belanja Barang bantuan operasional dalam bentuk uang	-		
Belanja Barang Operasional penanganan COVID 19	-		
Belanja Langganan Telepon	-		
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	10.500.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.068.094.765</b>	<b>1.109.570.618</b>	<b>(3,74)</b>
Pengembalian Belanja	-	(7.484.000)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.068.094.765</b>	<b>1.102.086.618</b>	<b>(3,08)</b>

**B.5 Belanja Modal**

*Belanja Modal*  
*Rp 0,-*

Pagu belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 70.115.574. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA *2022 mengalami penurunan dibandingkan TA 2021 disebabkan karena pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat anggaran belanja modal.*

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	70.115.574	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>70.115.574</b>	<b>-100,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>70.115.574</b>	<b>-100,00</b>

### B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal Tanah Rp 0,-*

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2022 tidak mengalami kenaikan dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena satker 06 tidak memiliki mata anggaran belanja modal tanah.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	Naik
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Tanah	0	0	#DIV/0!
Tanah	0	0	0
Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 0,-*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp 0,- Sedangkan Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 70.115.574. Realisasi mengalami penurunan 100 % bila dibandingkan dengan TA 2021. Tahun anggaran 2022 seluruh satker Katolik provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki anggaran belanja modal berupa peralatan dan mesin. Hal ini justru berbeda dengan tahun anggaran yang lalu dimana masih terdapat

anggaran belanja modal berupa peralatan dan mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	70.115.574	#VALUE!
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>70.115.574</b>	<b>-100,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>70.115.574</b>	<b>-100,00</b>

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 0,-*

Realisasi Belanja Modal berupa Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0 persen . Hal ini disebabkan karena satker katolik provinsi Sulawesi Tengah tidak mempunyai belanja modal gedung dan bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 0,-*

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bimas Katolik tidak memiliki mata anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Karena itu berarti untuk mata anggaran ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran

sebelumnya, karena dari tahun ke tahun semua satker katolik baik di kanwil maupun di daerah tidak memiliki mata anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

*Belanja Modal Lainnya  
Rp 0,-*

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal lainnya pada Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun tidak memiliki anggaran belanja modal lainnya.

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

*Belanja Bantuan Sosial  
Rp 0,-*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 tidak memiliki kenaikan ataupun turun. Hal ini disebabkan karena baik pada tahun anggaran yang lalu maupun pada tahun 2022, Bimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki mata anggaran belanja bantuan sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran Rp  
0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran terdiri dari : Satker 419321 (Kanwil) sebesar Rp 0,-, Satker kemenag Kabupaten Banggai Laut sebesar : Rp 0,-. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	THN 2022	TH 2021
Kas Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
		-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan Rp  
0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 dan 2021*

Keterangan	TAHUN 2022	Tahun 2021
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp 0,-*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0.

dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan 2021*

Keterangan	THN 2022	THN 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### C.4 Piutang PNBP

*Piutang PNBP  
Rp 0,-*

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP TA 2022 dan 2021*

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar  
TP/TGR Rp 0,-*

Tidak ada Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021*

No	Debitur per Satker	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Satker Kemenag Kota Palu	-	-
2	Satker kemenag kab. Parigi Moutong	-	-
3	Satker Kemenag Kabupaten Morowali	-	-
4	Satker Katolik Kemenag Kabupaten Bang	-	-
5	Satker Katolik Kemenag Kabupaten Bang	-	-
6	Satker Katolik Kemenag Kab. Tolitoli	-	-
7	Satker Katolik Kemenag Kab. Buol	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar  
TPA Rp 0,-*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2022 dan 2021*

No	Debitur per Satker	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih -  
Piutang Lancar Rp  
0,-*

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-

masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar  
TA 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,0%	-
Kurang Lancar	-	0,0%	-
Diragukan	-	0,0%	-
Macet	-	0,0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,0%	-
Kurang Lancar	-	0,0%	-
Diragukan	-	0,0%	-
Macet	-	0,0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,0%	-
Kurang Lancar	-	0,0%	-
Diragukan	-	0,0%	-
Macet	-	0,0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

### C.8 Beban Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di Muka Rp 0,-*

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp 0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021*

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp 0,-*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

#### *Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2022 dan 2021*

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.10 Persediaan

*Persediaan Rp.0,-*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021*

Persediaan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan  
TP/TGR  
Rp0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar RP.0,- dan Rp 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Satuan kerja Katolik tingkat Wilayah pada tahun anggaran 2022 tidak memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut:

#### Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2022 dan 2021

No	Debitur per Satker	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Satker Kanwil Prov. Sulteng	-	-
2	Satker Kemenag Kota Palu	-	-
3	Satker Kemenag Kab. Parigi Moutong	-	-
4	Satker Kemenag Kab. Morowali	-	-
5	Satker Kemenag Kab. Banggai	-	-
6	Satker Kemenag Kab. Tolitoli		
7	Satker Kemenag Kab. Buol		
8	Satker Kemenag Kab. Banggai Laut	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

### C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Rincian TPA untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	IH 2022	IH 2021
1	Sakter Kanwil Kemenag Prov. Sulteng	-	-
2	Satker Katolik Kota Palu	-	-
3	Satker Katolik Kab. Parimo		
4	Satker Katolik Kab. Morowali		
5	Satker Katolik Kab. Buol	-	-
6	Satker Katolik Kab. Tolitoli	-	-
7	Satker Katolik Kab. Banggai Laut	-	-
<b>Jumian</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp 0,-*

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Penyisihan Piutang tak tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang TA 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,0%	-
Kurang Lancar	-	0,0%	-
Diragukan	-	0,0%	-
Macet	-	0,0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,0%	-
Kurang Lancar	-	0,0%	-
Diragukan	-	0,0%	-
Macet	-	0,0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

### C.14 Tanah

*Tanah  
Rp 0,-*

Satker Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 maupun tahun anggaran sebelumnya tidak memiliki mata anggaran untuk pengadaan Tanah. Karena itu tidak ada pula Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup satker 06 (Katolik) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022. Dengan demikian tidak ada pula rinciannya..s

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 32 Desember 2021	Rp	-
31 Desember 2022	Rp	-

### C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin  
Rp 741.491.325,-*

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 741.491.325,- dan Rp 627.628.491 . Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>741.491.325</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	17.400.000
Penghapusan	Rp	(17.400.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>741.491.325</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(647.191.399)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>94.299.926</b>

Mutasi tambah:

- 1) Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat mutasi tambah untuk peralatan dan mesin karena tidak terdapat anggaran belanja modal. Terkait adanya kenaikan nilai peralatan dan mesin tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan karena ada 1 (satu) satker yaitu kemenag kota Palu (614909) mengalami normalisasi perubahan data peralatan dan mesin ketika ada update aplikasi simak BMN terjadi kesalahan pemutahiran data simak BMN yg selanjutnya berdampak pada bertambahnya nilai pada peralatan dan mesin satker yang bersangkutan. Neraca pada aplikasi BMN dan SAIBA sudah sama, tetapi pada e-Rekon berbeda. Saat dilakukan pernormalan kembali, tidak

bisa lagi dilakukan pengiriman ke e-rekon karena saat itu periode e-rekon sudah dinyatakan tutup permanen. Proses itu Selanjutnya sampai pada saat dilakukan migrasi ke aplikasi Sakti. Dan data yg keliru tersebut terbawa sampai pada Neraca aplikasi Sakti tahun 2023 yang diakibatkan oleh K3 semu hasil migrasi tahun 2021 ke tahun 2022.

- 2) Ada aset yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat . Aset tersebut juga terdapat pada satker kemenag kota Palu (614909) senilai Rp 17.400.000,- . Aset yang telah dihentikan penggunaannya itu belum bisa dihapuskan dari Neraca aplikasi Sakti karena masih menunggu SK ( Surat Penghapusan) dari KPKNL Prov. Sulteng.

### C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp 0,-*

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat saldo gedung dan bangunan . Demikian juga dengan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian tidak ada juga mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan seperti pada tabel sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
<b>Saldo per 30 Juni 2022</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2022</b>	-

*Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp 0,-*

### C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Semua satker katolik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki mata anggaran untuk belanja Jalan, Irigasi dan jaringan. Karena tidak terdapat belanja tersebut di atas, maka tidak terdapat

uraiannya pada tabel berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 202	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	-

Karena alasan tidak terdapat belanja jalan , irigasi dan jaringan maka Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp 0,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah R 0 dan Rp 0. Karena tidak adanya belanja aset tetap lainnya maka tidak terdapat adanya Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan seperti pada tabel sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
<b>Saldo per 30 Juni 2022</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	-
-	-

Mengenai rincian Aset Tetap Lainnya tidak dapat disajikan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini karena satker katolik tidak memiliki mata anggaran tersebut baik di Kanwil maupun pada satker kabupaten/kota.

### C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember

*Konstruksi  
dalam  
Pengerjaan*

*Rp0*

2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Untuk rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan*

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	0	-	0	0	0
2	0	-	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap Rp 636053.542,-*

**C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp 636.053.542 dan Rp 489.391.776 . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 741.491.325	Rp 636.053.542	Rp 105.437.783
2	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Rp 741.491.325</b>	<b>Rp 636.053.542</b>	<b>Rp 105.437.783</b>

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp0*

**C.21 Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan R 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud*

Uraian	Nilai
Software Komputer	0
ATB Lainnya	0
	<b>0</b>

Mutasi:

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	Rp	-
pembelian	Rp	-
<b>Saldo per 30 Juni 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Amortisasi	Rp	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Mutasi tambah: ( tidak ada )

**C.22 Aset Lain-Lain**

*Aset Lain-Lain  
Rp 17.400.000,-*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 17.400.000,- dan Rp 8.700.000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Bimas Katolik lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan aset jenis ini masih dalam proses penghapusan dari BMN. Aset ini terdapat pada satuan kerja penyelenggaraan Katolik Kemenag Kota Palu dengan kode satker 614909. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>8.700.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
- reklasifikasi dari aset tetap		
<b>Mutasi kurang:</b>	Rp	-
- BMN yang dihentikan penggunaannya	Rp	8.700.000
- penghapusan BMN	Rp	8.700.000
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>17.400.000</b>
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Rp	(17.400.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: ( tidak ada)

- a. Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian penggunaan Kamera Digital dan Infocus sebesar Rp 8.700.000,- dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.
- b. Nilai asset lainnya berupa asset yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat nilainya bertambah dari Rp 8.700.000 ( delapan juta tujuh ratus ribu rupiah ) pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai disebabkan karena adanya koreksi ketika peralihan dari aplikasi manual ( simak BMN) ke aplikasi Sakti. Satker 614909 ( kemanag kota Palu, saat peralihan tersebut terjadi kesalahan/kekeliruan dalam hal perbaikan data nilai asset yang telah dihentikan penggunaannya. Itulah sebabnya sehingga nilainya bertambah menjadi Rp 17.400.000,- ( Tujuh belas juta empat raus ribu rupiah.)*
- c. Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp 0. merupakan penghapusan kendaraan bermotor melalui penjualan

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tidak dapat disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini karena tidak terdapat aset lain-lain.

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

*Akumulasi  
Penyusutan  
17.400.000,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 17.400.000 dan Rp 8.700.000,- Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Software	0	0	0
ATB Lainnya	0	0	0
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>17.400.000</b>	<b>17.400.000</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>17.400.000</b>	<b>17.400.000</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

#### C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN Rp 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN tersebut terdiri dari : satker Kanwil sejumlah Rp 0 dan satker kemenag kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp 0,-.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN*

No	Uraian	Tahun 2022
1	Satker Katolik Kanwil	-
2	Satker Katolik Kota Palu	-
3	Satker Katolik Kab. Banggai Laut	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

#### C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 281.200. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan

belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga*

No	Uraian	Tahun 2022	TH 2021
1	Satker Kemenag Kab Buol	-	0
2	Satker kemenag Kab Tolitoli	-	281.200
3	Satker Kanwil	-	
4	Satker Kemenag Banggai	-	
5	Satker Kemenag Banggai Laut	-	
6	Satker Kemenag Kota palu	-	
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>281.200</b>

**C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

*Pendapatan Diterima di Muka Rp 0,-*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	-	0
Instansi Pemerintah Lainnya	-	0
Badan Lainnya	-	0
<b>Total</b>	<b>-</b>	

**C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

*Beban yang Masih harus Dibayar Rp 0,-*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0 dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan TA 2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### C.28 Ekuitas

*Ekuitas Rp  
94.299.926,-*

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 94.299.926,- dan Rp 137.955.515,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP  
Rp0,-*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Rincian uraian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan  
2021*

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2021.

*Beban Pegawai  
Rp 4.518.575.348,-*

### D.2 Beban Pegawai.

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2022 dan 2021 adalah

masing-masing sebesar Rp 4.518.575.348,- dan Rp 4.689.032.190,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### *Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.404.883.790	3.472.914.507	(2)
Beban Tunjangan-Tunjangan	1.114.062.159	1.216.118.435	(8)
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	#DIV/0!
Beban pegawai yg masih harus dibayar	-	-	#DIV/0!
Pengembalian beban pembulatan gaji	(370.601)	(752)	
<b>Jumlah</b>	<b>4.518.575.348</b>	<b>4.689.032.190</b>	(4)

*Beban  
Persediaan Rp  
17.126.000,-*

#### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan per tanggal 31 Desember 2022 Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 17.126.000,- dan Rp 19.567.464,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	17.126.000	19.567.464	(12,48)
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>17.126.000</b>	<b>19.567.464</b>	(12,48)

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

**Beban Barang dan Jasa Rp 814.064.579,-**

Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 814.064.579- dan Rp **745.131.282,-** Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	135.996.209	114.343.682	18,94
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	182.732.000	203.640.000	-10,27
Beban Barang yg diserahkan ke Masyarakat	0	10.500.000	-100,00
Beban Langganan telepon	23.051.370	12.276.600	87,77
Beban barang pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang	423.000.000	368.000.000	14,95
Beban Jasa Profesi	24.300.000	29.700.000	-18,18
Beban barang operasional penanganan pandemi COVID 19	7.200.000	6.985.000	3,08
Beban Bahan	17.785.000	10.186.000	74,60
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>814.064.579</b>	<b>745.131.282</b>	<b>9,25</b>

**D.5 Beban Pemeliharaan**

**Beban Pemeliharaan Rp 54.008.755,-**

Beban Pemeliharaan per tanggal 31 Desember 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 54.008.755,- dan Rp 54.711.837,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021**

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.008.755	54.711.837	-1,29
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>54.008.755</b>	<b>54.711.837</b>	<b>-1,29</b>

**Beban Perjalanan Dinas Rp 183.751.431,-**

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 183.751.431,- dan Rp

272.176.035. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	115.736.431	116.640.035	-0,77
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	16.960.000	-78,77
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.415.000	146.060.000	-55,90
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	-7.484.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>183.751.431</b>	<b>272.176.000</b>	<b>-32,49</b>

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp 0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 10.500.000,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2021. *Pada tahun anggaran 2022 Satker dalam lingkungan Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki anggaran untuk bantuan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk barang.* Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	10.500.000	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>-100,00</b>

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban  
Bantuan  
Sosial Rp 0,-*

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban bantuan sosial tidak dapat dincikan untuk Tahun 2022 dan 2021. Hal ini disebabkan karena semua satker 06 ( Katolik) di Kanwil maupun di kabupaten/kota dilingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah tidak Memiliki belanja bantuan sosial. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp 81.863.715,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 81.863.715,- dan Rp 59.273.709,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	81.863.715	59.273.709	38
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>81.863.715</b>	<b>59.273.709</b>	38
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>81.863.715</b>	<b>59.273.709</b>	38

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp 0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2022  
dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

## D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp  
0,-

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Pengembalian belanja Pegawai Belanja Barang TAYL	0	0	#DIV/0!
Penjualan Alat Kantor	0	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	#DIV/0!
Pendapatan perolehan aset lainnya	0		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	-	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	-	
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b> *)

*Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

## D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Defisit Pos  
Luar Biasa  
Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pos Luar Biasa TA 2022 dan 2021

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

Berdasarkan data pada Laporan Operasional Bimas Katolik baik di kanwil maupun satker di Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa tidak terdapat realisasi pada pos luar biasa ( 0 ).

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

*Rp 137.955.515*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 137.955.515,- dan Rp 126.428.183.-

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

*Defisit LO Rp*

*5.669.533.828,-*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar Rp 5.669.533.828,- dan Rp 5.850.392.517. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak*

*Kumulatif*

*Perubahan*

*Kebijakan*

*Akuntansi/Kesalahan*

*Mendasar*

*Rp 0,-*

### **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,-.

*Penyesuaian*

*Nilai Aset*

*Rp0,-*

### **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan Rp*

*38.926.926,-*

### **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. *Pada tahun 2022 terdapat koreksi yang diakibatkan oleh penjurnalan terpusat selisih rekonsiliasi internal TAYL pada 1 (satu) satker yaitu kemenag kota*

*Palu (614909)*. Koreksi yang mengurangi/menambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 38.926.926,- dan Rp 966.667,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

**E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,-*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Tidak terdapat Selisih revaluasi aset tetap baik di tingkat kanwil maupun pada satker kabupaten/kota Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 31 Desember 2022.

**E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp 38.926.926,-*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp38.926.926,- dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. *Koreksi ini terjadi diakibatkan oleh jurnal terpusat selisih rekonsiliasi internal TAYL pada 1 (satu) satker yaitu kemenag kota Palu (614909).*

### Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	38.926.926
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>38.926.926</b>

### E.3.6 Koreksi Lain-lain

#### *Koreksi Lain-lain Rp0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

#### *Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

### E.4 Transaksi Antar Entitas

#### *Transaksi Antar Entitas Rp 5.586.951.313,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 5.586.951.313,- dan Rp 5.860.953.182,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.586.951.313
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.586.951.313</b>

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sejumlah Rp 0 sedangkan DKEL sejumlah Rp 0,-

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0 terdiri dari:

NO	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Satker...	-
3	Persediaan	Satker...	-
	<b>Jumlah</b>		-

Sampai dengan tanggal pelaporan per 31 Desember 2022 semua satker Bimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki realisasi Transfer Keluar.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dari total Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1		0	Rp -
		0	Rp -
2		0	Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

*Ekuitas Akhir*  
Rp 94.299.926,-

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 94.299.926,- dan Rp 137.955.515.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1.KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

### **F.2. PENGUNGKAPAN LAIN**

## **VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR**

### **A. LAMPIRAN UTAMA**

**NERACA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 06

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

UAPPW

: 025061800KD BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK -

Tgl Data 13/02/23 3:50 AM

Tgl. Cetak 13/02/2023 6:59 AM

lap\_neraca\_uappaw\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	741,491,325	627,628,491	113,862,834	18.14
AKUMULASI PENYUSUTAN	(647,191,399)	(489,391,776)	(157,799,623)	32.24
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>94,299,926</b>	<b>138,236,715</b>	<b>(43,936,789)</b>	<b>(31.78)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	17,400,000	8,700,000	8,700,000	100.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(17,400,000)	(8,700,000)	(8,700,000)	100.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>94,299,926</b>	<b>138,236,715</b>	<b>(43,936,789)</b>	<b>(31.78)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	281,200	(281,200)	(100.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0</b>	<b>281,200</b>	<b>(281,200)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0</b>	<b>281,200</b>	<b>(281,200)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	94,299,926	137,955,515	(43,655,589)	(31.64)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>94,299,926</b>	<b>137,955,515</b>	<b>(43,655,589)</b>	<b>(31.64)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>94,299,926</b>	<b>137,955,515</b>	<b>(43,655,589)</b>	<b>(31.64)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>94,299,926</b>	<b>138,236,715</b>	<b>(43,936,789)</b>	<b>(31.78)</b>



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025**

**WILAYAH/PROVINSI : BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK - KANWIL KEMENAG SULTENG] 025061800KD**

*Waktu Olap: 2023-02-13 03:47:02.0 [B@1a3eac4d*

Kode Lap : LRA.F.W.1

Tanggal : 13/02/23 6:51 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_ira\_face\_uappaw\_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>5,784,415,000</b>	<b>5,586,951,313</b>	<b>(197,463,687)</b>	<b>97</b>	<b>6,030,409,000</b>	<b>5,860,953,182</b>	<b>(169,455,818)</b>	<b>97</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
(dalam rupiah)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**  
**ESELON I**  
**WILAYAH/PROVINSI**

: 025  
: 06  
: 025061800KD

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**  
**BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK - KANWIL**  
**KEMENAG SULTENG]**

Kode Lap : LO.WIL  
Tanggal : 13/02/23 7:00 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lo\_wilayah --SAKTI  
Tgl Data : 13/2/23 4:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	0	0	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	4,518,575,348	4,689,032,190	(170,456,842)	-
Beban Persediaan	17,270,000	19,567,464	(2,297,464)	-
Beban Barang dan Jasa	814,064,579	745,131,282	68,933,297	-
Beban Pemeliharaan	54,008,755	54,711,837	(703,082)	-
Beban Perjalanan Dinas	183,751,431	272,176,035	(88,424,604)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	10,500,000	(10,500,000)	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-

**LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT WILAYAH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(dalam rupiah)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
ESELON I  
WILAYAH/PROVINSI**

**: 025 KEMENTERIAN AGAMA  
: 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
: 025061800KD BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK - KANWIL  
KEMENAG SULTENG]**

Kode Lap : LO.WIL  
Tanggal : 13/02/23 7:00 AM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lo\_wilayah --SAKTI  
Tgl Data : 13/2/23 4:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	81,863,715	59,273,709	22,590,006	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>5,669,533,828</b>	<b>5,850,392,517</b>	<b>(180,858,689)</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(5,669,533,828)</b>	<b>(5,850,392,517)</b>	<b>180,858,689</b>	-
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(5,669,533,828)</b>	<b>(5,850,392,517)</b>	<b>180,858,689</b>	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(5,669,533,828)</b>	<b>(5,850,392,517)</b>	<b>180,858,689</b>	-

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT WILAYAH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(dalam rupiah)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 06 **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025061800KD **BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK - KANWIL KEMENAG SULTENG]**

Prn Data : 13/02/23 7:10 AM  
 Kode Lap : LPE.WIL  
 Tanggal : 13/02/23 7:31 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lpe\_uappaw --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	137,955,515	126,428,183	11,527,332	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,669,533,828)	(5,850,392,517)	180,858,689	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	38,926,926	966,667	37,960,259	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	966,667	(966,667)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	38,926,926	0	38,926,926	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,586,951,313	5,860,953,182	(274,001,869)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(43,655,589)	11,527,332	(55,182,921)	-
EKUITAS AKHIR	94,299,926	137,955,515	(43,655,589)	-

**B. LAMPIRAN TAMBAHAN**

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI :

BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK -

*Tgl. Cetak 14/02/2023*

*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_uappaw --rekon17*

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	627,628,491	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	489,391,776
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,700,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,700,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	281,200
0.0	391111	Ekuitas	0	137,955,515
<b>JUMLAH</b>			<b>636,328,491</b>	<b>636,328,491</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 2022**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 06

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : 025061800KD BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK -

Tgl Data 14/02/23 7:13 AM

Tgl. Cetak 14/02/2023 10:38 AM

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,586,951,313
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,569,175,580	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,876	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	112,807,506	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32,507,588	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29,475,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	119,522,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,835,500	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	85,600,440	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	276,121,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,695,000	0
3.0	511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	1,164,901,500	0
3.0	511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	4,500,000	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	15,000,000	0
3.0	511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	573,000,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	526,062,159	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	135,996,209	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	182,732,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	7,200,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	17,785,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	423,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,270,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	23,051,370	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	24,300,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54,008,755	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	115,736,431	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64,415,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	601
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,000
<b>JUMLAH</b>			<b>5,587,321,914</b>	<b>5,587,321,914</b>

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT WILAYAH

PER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI

: 06

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI

: 025061800KD BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK -

Tgl Data 14/02/23 7:05 AM

Tgl. Cetak 14/02/2023 10:38 AM

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	741,491,325	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	647,191,399
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	17,400,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	17,400,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,586,951,313
0.0	391111	Ekuitas	0	137,955,515
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	38,926,926
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,569,175,580	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	23,876	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	112,807,506	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32,507,588	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	29,475,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	119,522,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,835,500	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	85,600,440	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	275,839,800	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,695,000	0
3.0	511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	1,164,901,500	0
3.0	511155	Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	4,500,000	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	15,000,000	0
3.0	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	573,000,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	526,062,159	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	135,996,209	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	182,732,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	7,200,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	17,785,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	423,000,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	23,051,370	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	24,300,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54,008,755	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	115,736,431	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64,415,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	81,863,715	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	16,670,000	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	600,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	0	601
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
JUMLAH			<b>6,428,795,754</b>	<b>6,428,795,754</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 0 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : null null  
**WILAYAH/PROVINSI** : null null

Kode Lap : LRA.P.W.1  
 Tanggal : 14/02/23 10:39 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_pend\_akun\_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null	null					
null	null					
	null	null	null	null	null	0
	null	null	null	null	null	0
	JUMLAH PENDAPATAN	null	null	null	null	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 KEMENTERIAN AGAMA  
**ESELON I** : 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025061800KD BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK - KANWIL KEMENAG SULTENG]

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 14/02/23 2:35 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,201,750,000	1,569,390,000	1,569,175,580	0	1,569,175,580	99.99	214,420
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	61,000	61,000	23,876	0	23,876	39.14	37,124
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	125,340,000	112,814,000	112,807,506	0	112,807,506	99.99	6,494
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	38,662,000	32,515,000	32,507,588	0	32,507,588	99.98	7,412
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,420,000	29,475,000	29,475,000	0	29,475,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	115,444,000	119,524,000	119,522,000	601	119,521,399	100	2,601
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	20,000	1,838,000	1,835,500	0	1,835,500	99.86	2,500
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	88,985,000	85,607,000	85,600,440	0	85,600,440	99.99	6,560
511129	Belanja Uang Makan PNS	337,776,000	284,201,000	276,121,000	0	276,121,000	97.16	8,080,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,360,000	8,695,000	8,695,000	370,000	8,325,000	95.74	370,000
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	1,341,952,000	1,196,524,000	1,164,901,500	0	1,164,901,500	97.36	31,622,500
511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	6,000,000	6,000,000	4,500,000	0	4,500,000	75	1,500,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>3,294,770,000</b>	<b>3,446,644,000</b>	<b>3,405,164,990</b>	<b>370,601</b>	<b>3,404,794,389</b>	<b>98.8</b>	<b>41,849,611</b>
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	720,000,000	720,000,000	573,000,000	0	573,000,000	79.58	147,000,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115</b>	<b>735,000,000</b>	<b>735,000,000</b>	<b>588,000,000</b>	<b>0</b>	<b>588,000,000</b>	<b>80</b>	<b>147,000,000</b>
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	542,068,000	532,890,000	526,062,159	0	526,062,159	98.72	6,827,841
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124</b>	<b>542,068,000</b>	<b>532,890,000</b>	<b>526,062,159</b>	<b>0</b>	<b>526,062,159</b>	<b>98.72</b>	<b>6,827,841</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>4,571,838,000</b>	<b>4,714,534,000</b>	<b>4,519,227,149</b>	<b>370,601</b>	<b>4,518,856,548</b>	<b>95.86</b>	<b>195677452</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	128,653,000	136,531,000	135,996,209	0	135,996,209	99.61	534,791
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	187,920,000	182,732,000	182,732,000	0	182,732,000	100	0
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>323,773,000</b>	<b>326,463,000</b>	<b>325,928,209</b>	<b>0</b>	<b>325,928,209</b>	<b>99.84</b>	<b>534,791</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025                   **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 06                         **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025061800KD BA(025) ES1(06) SULAWESI TENGAH [BIMAS KATOLIK - KANWIL KEMENAG SULTENG]

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 14/02/23 2:35 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	26,210,000	17,785,000	17,785,000	0	17,785,000	100	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,000,000	0	0	0	0	0	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	423,000,000	423,000,000	423,000,000	0	423,000,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>455,210,000</b>	<b>440,785,000</b>	<b>440,785,000</b>	<b>0</b>	<b>440,785,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,270,000	16,270,000	16,270,000	0	16,270,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>16,270,000</b>	<b>16,270,000</b>	<b>16,270,000</b>	<b>0</b>	<b>16,270,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	25,200,000	23,254,000	23,051,370	0	23,051,370	99.13	202,630
522151	Belanja Jasa Profesi	32,400,000	24,300,000	24,300,000	0	24,300,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>57,600,000</b>	<b>47,554,000</b>	<b>47,351,370</b>	<b>0</b>	<b>47,351,370</b>	<b>99.57</b>	<b>202,630</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67,390,000	54,390,000	54,008,755	0	54,008,755	99.3	381,245
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>67,390,000</b>	<b>54,390,000</b>	<b>54,008,755</b>	<b>0</b>	<b>54,008,755</b>	<b>99.3</b>	<b>381,245</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	107,448,000	116,404,000	115,736,431	0	115,736,431	99.43	667,569
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,890,000	64,415,000	64,415,000	0	64,415,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>195,938,000</b>	<b>184,419,000</b>	<b>183,751,431</b>	<b>0</b>	<b>183,751,431</b>	<b>99.64</b>	<b>667,569</b>
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	12,000,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1,128,181,000</b>	<b>1,069,881,000</b>	<b>1,068,094,765</b>	<b>0</b>	<b>1,068,094,765</b>	<b>99.83</b>	<b>1786235</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,700,019,000</b>	<b>5,784,415,000</b>	<b>5,587,321,914</b>	<b>370,601</b>	<b>5,586,951,313</b>	<b>96.59</b>	<b>197,463,687</b>